

**KEBUDAYAAN NASIONAL  
DAN INTEGRASI MASYARAKAT SEBAGAI BANGSA**

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL. :	13 Oktober 2008
SUMBER HARGA :	Hd
KOLEKSI :	KI
NO. INVENTARIS :	206/Hd/08.K. (1)
KLASIFIKASI :	306 fir k-1

Culture

**Oleh: Drs. Miko Siregar, M.Si**

**Makalah ini Disajikan pada Diskusi  
di Jurusan Pendidikan Sendratasik FBSS UNP  
pada April 2006**

**FAKULTAS BAHASA SASTRA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

# **KEBUDAYAAN NASIONAL DAN INTEGRASI BANGSA**

**Oleh: Drs. Miko Siregar, M.Si**

## **A. Pendahuluan**

Indonesia sebagai bekas negeri jajahan telah berdiri lebih dari setengah abad. Dalam usia setua itu, masalah persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai suatu nasion masih tetap menjadi urusan yang tidak mudah. Potensi yang menjurus ke arah disintegrasi bangsa merupakan keadaan yang perlu mendapatkan kewaspadaan. Dalam pandangan Furnival (1948) negeri jajahan ini pada dasarnya memiliki karakteristik masyarakat majemuk yakni merupakan kumpulan dari kelompok-kelompok komunitas etnik tetapi tidak merupakan suatu kesatuan sebagai suatu bangsa. Keberadaan kelompok-kelompok komunitas etnik tersebut telah ada sebelum Indonesia menjadi sebuah negara. Adanya bangsa Indonesia, kata Abdullah (Nasionalisme dan Sejarah, 2001) adalah hasil pilihan yang diperjuangkan. Dalam memperjuangkan pilihan itu, telah terjadi perdebatan di antara para pemilih cita-cita *nation formation* dan *nation-building*.

Banyak di antara masyarakat bangsa yang baru merdeka di dunia terwujud sebagai hasil perpaduan sejumlah bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa yang semula hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial yang lebih kecil sehingga memerlukan identitas yang dapat mempersatukannya. Sementara itu ada juga bangsa-bangsa yang memang sejak semula merupakan satu masyarakat bangsa yang “homogen” akan tetapi karena penindasan oleh bangsa lain, mereka itu kehilangan identitas yang dapat mempersatukan segenap warganya sebagai satu bangsa yang merdeka. Drake (1989) mengatakan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi negara-negara

berkembang – termasuk Indonesia – adalah bagaimana mempromosikan integrasi nasional, atau bagaimana mengikat keanekaragaman daerah dan penduduk menjadi satu kesatuan yang berfungsi baik dan saling tergantung.

Keadaan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh bangsa-bangsa berkembang lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa di kepulauan Nusantara pernah berkembang negara-negara besar maupun kecil yang semula masing-masing negara itu bebas berkembang. Di samping itu karena letak geografis dan proses sejarah telah pula mengembangkan masyarakat suku-suku bangsa yang masing-masing mendukung kebudayaan yang beragam pula. Belum lagi terhitung pengaruh kebudayaan asing dan agama yang melanda masyarakat Indonesia di masa lampau (Boedisantoso, 1993). Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan yang mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia dan memepersatukan segenap penduduknya menjadi bangsa telah menimbulkan berbagai tantangan dan kebutuhan, khususnya kebutuhan akan kebudayaan yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang terwujud sebagai masyarakat majemuk. Selain cita-cita dan perjuangan untuk membebaskan diri dari penindasan penjajah yang menimbulkan perasaan senasib, diperlukan kerangka acuan yang dapat memelihara dan memperkokoh persatuan dan mendorong serta mengarahkan perjuangan bangsa selanjutnya, yaitu mencapai cita-cita bersama. Kerangka acuan nasional itu karenanya diperlukan agar dapat memberikan makna dan arah kehidupan berbangsamemberikan pilihan strategi untuk menanggapi tantangan, memberikan kebanggaan nasional yang akan memperkuat kepribadian bangsa.

Namun dalam pengembangan kebudayaan yang berfungsi sebagai kerangka acuan nasional di Indonesia itu tidaklah mudah. Walaupun dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 dengan jelas ditunjukkan kerangka

pengembangan kebudayaan nasional, namun dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan ketegangan dan bahkan pertentangan sosial. Di samping faktor-faktor yang mendukung, ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam usaha pengembangan kebudayaan nasional. Di antara faktor – faktor dalam maupun luar yang perlu diperhatikan ialah kemajuan akan masyarakat Indonesia, dinamika masyarakat yang sedang membangun dan perubahan lingkungannya.

## **B. Indonesia sebagai Masyarakat Majemuk**

Kemajemukan suatu masyarakat seringkali diabaikan orang dalam usaha pembangunan suatu bangsa. Seolah-olah apabila suatu bangsa telah lahir, baik damai atau melalui peperangan dan penindasan, segalanya telah siap untuk menikmati hidup baru (Boedisantoso, 1993).

Dalam pandangan Suparlan (2004) konsep masyarakat majemuk pada dasarnya berbeda dengan masyarakat multikultural. Multikulturalisme sebagai ideologi tentang perbedaan dalam kesederajatan mempunyai fondasi kebudayaan dalam masyarakat yang terwujud sebagai mozaik kebudayaan yang ada dalam suatu bangsa. Jika dalam masyarakat majemuk yang dipentingkan adalah sukubangsa dan kebudayaan sukubangsa, dalam multikulturalisme ditekankan pentingnya kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat.

Sebaliknya ada sejumlah sarjana yang menekankan studinya pada kenyataan akan kemungkinan adanya ketegangan dan pertentangan dalam setiap kesatuan sosial karena perbenturan kepentingan antara mereka yang berusaha untuk mengatasi perbedaan mengembangkan kebersamaan, di lain pihak ada yang berusaha mempertahankan perbedaan – perbedaan.

Dinamika pergolakan sosial sebagai akibat pergaulan antarsuku atau golongan dalam suatu masyarakat bangsa tidak dapat diabaikan karena selain hal itu akan menimbulkan ketidakseimbangan juga dapat memacu perubahan ke arah pembaharuan yang justru diperlukan dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat majemuk yang bersangkutan.

Dari Clark (1989) dapat kita rujuk beberapa contoh yang menunjukkan betapa masyarakat majemuk di berbagai negara mengalami pergolakan yang tidak kecil artinya bagi perkembangan masyarakat dan kebudayaan mereka, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Salah satu contoh yang aktual ialah keadaan di India yang terbagi dalam masyarakat Hindu, Muslim, Parsis, dan Sikh. Pada akhir-akhir ini masyarakat Sikh bergerak dan ingin diakui dan dihormati keberadaan dan otonominya sebagai salah satu bagian dari masyarakat India yang majemuk itu. Kemajemukan yang menimbulkan persoalan sosial budaya di India itu. Sementara itu belum terhitung banyaknya kelompok sosial yang menggunakan bahasa yang berbeda dalam lingkungan budaya yang sama, penduduknya masih terbagi dalam pengelompokan kasta yang beragam. Masing-masing kasta mengembangkan tradisi yang tidak mudah ditinggalkan karena ditanamkan dan dihayati sebagai kerangka acuan dalam kehidupan sejak lahir.

Tidak kalah rumitnya keadaan di negara tetangga yang terdekat, yaitu Malaysia. Dewasa ini pemerintah dan penduduk Malaysia terkecuali menghadapi masalah yang timbul karena kemajemukan masyarakat yang masing-masing mendukung kebudayaan yang berbeda, seperti orang-orang Melayu yang beragama Islam, orang-orang India dan Cina yang beragama Budha dan Kong Hu Cu maupun mereka yang beragama Hindu. Belum lagi kemajemukan yang timbul karena terhitung masyarakat "keterasingan" yang

membuat mereka tidak menyadari akan adanya masyarakat bangsa yang melibatkan mereka dalam kesatuan sosial yang lebih besar dan sama sekali belum tersentuh oleh jaringan sosial baru.

Keadaan yang lebih parah ialah apa yang terjadi di Birma. Orang-orang Chin, Karen, Cina dan Hindu hidup bersama dilandasi kepentingan ekonomi, akan tetapi kurang ditanamkan kesadaran hidup bersama sebagai suatu bangsa. Akibatnya mereka membentuk komunitas-komunitas yang menggunakan bahasa dan mengacu pada kebudayaan dan tradisi masing-masing yang berbeda. Belum lagi suku-suku bangsa yang terpinggirkan yang belum terlibat dalam jaringan sosial yang lebih luas dan tidak menyadari akan adanya kesatuan sosial yang lebih besar, yaitu kesatuan bangsa di luar komunitas-komunitas mereka. Bagi masyarakat yang disebut belakangan, kemerdekaan negrinya tidak banyak berarti bagi kehidupan sosial budaya mereka. Pemerintahan nasional seolah-olah hanya salah satu penguasa "luar" komunitas yang tidak berbeda dengan penguasa "asing" lainnya.

Keadaan yang serupa pada garis besarnya berlaku juga di Indonesia, khususnya yang menyangkut kemajemukan masyarakat yang terdiri dari sejumlah suku bangsa yang masing-masing mendukung tradisi budaya yang beraneka ragam, serta keyakinan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Demikian pula sementara suku masih "terpinggirkan" secara fisik maupun mental, sehingga pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa diantara mereka belum benar-benar menjangkau secara mendalam. Kenyataan tersebut sangat disadari oleh para pendiri negara RI pada awal kemerdekaan sebagaimana tersimpul dalam pasal 32 UUD 1945. dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai satu masyarakat yang majemuk, para pendiri negara itu merasakan perlunya memajukan kebudayaan nasional yang dapat menjembatani keberagaman latarbelakang budaya dalam masyarakat.

Pentingnya kebudayaan nasional dalam masyarakat majemuk dapat dirasakan terutama kalau orang mulai terlibat dalam perluasan jaringan sosial yang melintasi batas-batas lingkungan masyarakat atau daerah sehingga memerlukan kerangka acuan yang bersifat netral dan bisa diterima semua pihak. Penggunaan kebudayaan sukubangsa atau daerah tertentu sebagai kerangka acuan dalam pergaulan lintas suku bangsa dan masyarakat daerah, dapat menimbulkan ketegangan sosial karena salah satu paham atau pengetahuan atas satu gejala yang sama. Kebutuhan akan kerangka acuan yang bersifat nasional dalam masyarakat majemuk itu perlu diatasi bukan dengan mematikan budaya-budaya daerah yang menjamin keberadaannya oleh UUD 1945, baik pasal 32 maupun 18, melainkan dengan mengembangkan kebudayaan nasional. Pengembangan kebudayaan nasional juga diperlukan terutama sebagai kerangka acuan dalam arena-arena sosial yang bersifat resmi dan mempunyai jangkauan secara nasional. Sebagai contoh dapat dikemukakan kebutuhan akan seperangkat nilai-nilai budaya, norma-norma sosial dan pandangan hidup yang melapisi sistem organisasi kemasyarakatan, khususnya dalam sistem politik dan pemerintahan yang diperlukan untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa. Kebudayaan nasional juga diperlukan untuk mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan nasional antara lain dengan pengembangan wawasan nusantara. Demikian pula dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, kebudayaan nasional diperlukan sebagai kerangka acuan untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional. Masih banyak faktor sosial maupun non sosial yang memerlukan kerangka acuan nasional dalam pengembangan sistem pengendalian dan pembinaannya, seperti pengendalian lingkungan, kependudukan, ekonomi dan industri.

### **C. Pembangunan dan Kesejahteraan Nasional**

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan bangsa ialah dinamika masyarakat yang sedang membangun. Ada pun arti yang diberikan pada pembangunan yang sedang diselenggarakan di Indonesia, pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan di segala sektor kehidupan secara berencana. Boleh dikatakan bahwa hampir seluruh negara berkembang kini sedang mengalami proses pembaharuan secara berencana dan berlangsung dalam tempo yang cepat.

Berbeda dengan pembaharuan berencana yang dilakukan oleh pemerintah kolonial yang ditujukan untuk memperkuat kepentingannya, negara yang berkembang kini merencanakan pembangunan secara menyeluruh dengan mengarahkan peran serta segenap anggota masyarakat tanpa kecuali untuk kepentingannya masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus dapat meyakinkan penduduk akan arti pentingnya proses pembaharuan serta dapat merangsang peran serta penduduk secara aktif tanpa adanya paksaan. Demikian pula kecepatan perubahan harus diperhitungkan tidak seperti apa yang terjadi dalam proses pembaharuan alamiah yang berlangsung santai sesuai dengan kemampuan masyarakat menangkap umpan yang terjangkau serta menggapainya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam proses pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang materil maupun spiritual dalam tempo yang relatif singkat itu telah memaksa pemerintah untuk mengambil alih ilmu dan teknologi modern. Penganbilalihan ilmu dan teknologi modern itu bukanlah soal yang berat, karena memang memenuhi sejumlah prinsip akulturasi, seperti kekonkritan, kegunaan, fungsi dan mungkin juga integrasi. Apa yang seringkali menghambat justru biasanya timbul karena



sikap mental masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersangkutan. Pada umumnya hambatan pengambilalihan ilmu dan teknologi modern itu disebabkan kekhawatiran sementara golongan akan hancurnya nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial dan pandangan hidup yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pandangan yang senantiasa memuja kejayaan di masa lampau seolah-olah kebudayaan lama dan asli itu maha besar dan harus dipertahankan seutuhnya.

Menurut Boedisantoso (1993) perlu dipertimbangkan upaya pengembangan kebudayaan nasional agar tidak terlepas dari akar-akarnya. Di lain pihak pengambilalihan ilmu dan teknologi dalam pembangunan itu juga dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan pertentangan sosial, karena adanya sementara golongan yang ingin segera memperkembangkan kebudayaan nasional sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. Orang-orang yang pandangannya lebih mengutamakan kekinian (*cofiguratif*) itu sering kali meremehkan arti kebudayaan lama dan asli yang dianggapnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Mereka biasanya tidak sabar lagi memperkembangkan kebudayaan baru yang dapat berfungsi sebagai kerangka acuan modern tanpa menghiraukan keasliannya. Walaupun pandangan yang mengutamakan kekinian itu merupakan tanggapan terhadap tantangan dan menunjukkan kemampuan masyarakat yang bersangkutan menanggapi umpan balik dari lingkungan, akan tetapi tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pandangan yang memuja-muja kejayaan di masa lampau sehingga menghambat perkembangan kebudayaan, tidak dapat diabaikan. Justru kedua pola pemikiran itu harus dapat dikawinkan agar dapat terwujud perkembangan kebudayaan yang mencerminkan dinamika masyarakat tanpa terlepas dari akar budayanya.

setempat maupun penyerapan unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam sistem budaya nasional. Demikian pula tanggapan terhadap perubahan lingkungan serta struktur demografi dan upaya pemanfaatannya dapat ditampung dalam kebudayaan nasional yang dihayati oleh pendukungnya, karena arah pengembangan budaya yang melihat jauh ke depan menuju peradapan yang mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Keempat, pembinaan bahasa nasional sebagai media komunikasi nasional yang dapat menjembatani pergaulan antar-sukubangsa yang menggunakan berbagai bahasa suku bangsa maupun daerah.

### **Daftar Kepustakaan**

- Abdullah, Taufik,  
2001 **Nasionalisme & Sejarah**. Jakarta: Satya Historika.
- Boedisantoso, S.,  
1993 "Kebudayaan Nasional dan Integrasi". Makalah yang Disajikan dalam Seminar Nasional di Jakarta Tahun 1993.
- Clark, Robert C.,  
1989 **Kekuasaan dan Politik di Dunia Ketiga**. Jakarta: Airlangga.
- Drake, Cristine,  
1989 **National Integration in Indonesia: Patterns and Policies**. Honolulu: University of Hawaii Press.

206/Hd/08 - k1 (1)

MILIK PERUSAHAAN

Suparlan, Parsudi

2004

**Hubungan Antar-Sukubangsa.** Jakarta: Yayasan  
Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

306

sin

K.1